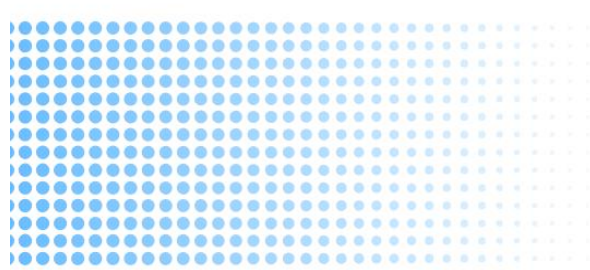




# RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2026





## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 ini dapat tersusun.

Penyusunan Perubahan Renja ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026.

Rencana Kerja 2025 sebagai penjabaran Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023–2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 Satpol Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Pangkalpinang, 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

YAMOWA'A HAREFA, AP. NIP.  
19750130 199402 1 003

**DAFTAR ISI**

	<b>Hal</b>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	11
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	42
BAB III	59
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	59
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	59
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SATPOLPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	60
3.3 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	62
3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	65
3.5 Program dan Kegiatan Tahun 2022	66
BAB IV	68
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	68
BAB V	100
PENUTUP	100



**DAFTAR TABEL**

	Hal	
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	13
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	38
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	42
Tabel 3.1	Sasaran dan Target Kinerja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dan Tahun 2026	61
Tabel 3.2	Analisis Renstra K/L Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan	63
Tabel 3.3	Target Sasaran Strategis SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026	66
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	73



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	2

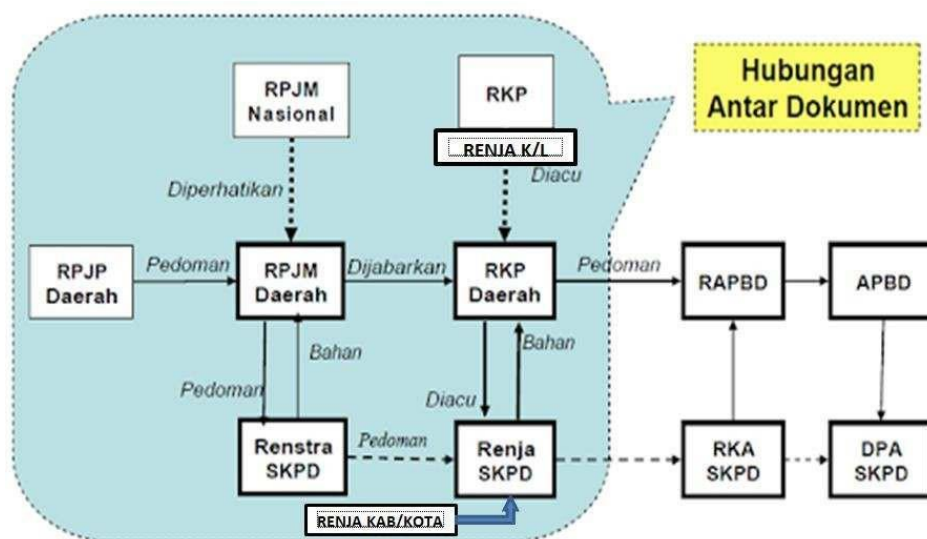


## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Renja PD sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dimana RKPD dijadikan dasar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sedangkan Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja kabupaten/kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD dilihat dalam gambar di bawah ini :



Gambar I.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat daerah disusun dengan tahapan: (1). persiapan penyusunan; (2). penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum /lintas bidang; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan.

Penyusunan Renja Rencana Kerja Satuan Polisi PAmong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (SATPOL PP) Tahun 2026 memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran tahun keempat dari RPD Tahun2023-2026 sehingga prioritas sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan



diarahkan pada pencapaian target akhir Renstra. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu dan saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan tahapan penyusunan renja di atas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Perangkat Daerah berkewajiban menyusun rancangan renja untuk tahun 2026. Renja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026 menjadi bahan penelaahan penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan akan dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 131);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 –2034);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan



Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 adalah sebagai dasar penyusunan rancangan KUA PPAS SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 dan optimalisasi pencapaian sasaran Renstra SATPOL PP.

Tujuan penyusunan Renja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 adalah:

1. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi



pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Renja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SATPOL PP agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L.

##### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

##### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja PD.

##### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SATPOL PP Tahun 2026 dan Capaian Renstra SATPOL PP

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun anggaran 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SATPOL PP

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SATPOL PP berdasarkan indikator kinerja yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi SATPOL PP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SATPOL PP

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SATPOL PP dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SATPOL PP; menguraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SATPOL PP Provinsi dengan SATPOL PP kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SATPOL PP;



3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bapepda.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SATPOL PP.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SATPOL PP

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SATPOL PP yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SATPOL PP.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut



## BAB II

## HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Pemerintah Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SATPOL PP dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SATPOL PP serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat. Dengan memperhatikan pembangunan bidang pada RKP tahun 2026 dan program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perubahan RKPD tahun 2026 maka Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 mencakup 3 program dan 12 kegiatan.

Untuk target kinerja kegiatan menyesuaikan target dan sasaran renstra 2023-2026. Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan dari tiap program yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Renja Satuan Polisi



Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, dapat diketahui bahwa SATPOL PP Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung untuk realisasi kinerja sampai dengan triwulan ke IV sebesar 82,15% % dengan predikat Sangat Tinggi (ST) sedangkan untuk rata-rata capaian keuangan seluruh program sebesar 95,42 % dengan predikat Tinggi (T).



**Tabel 2.1**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d dengan Tahun 2021(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (n-2)			Target program (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)(2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
			-							
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sakip PD/SATPOL PP ( Presentase)	80	80	80%	80	100%	80	100%	1,25%
		Survey kepuasan pelayanan keuangan (Persentase)	95	95,04	95%	95,04	99,95%	95	99,95%	1,05%
2	Program Peninokatan ketenraman dan ketertiban Umum	Persentase pelanggaran tribuntrnmas yang ditindak	100 %	100	100	100 %	100%	100%	100%	100%



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d dengan Tahun 2021(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (n-2)			Target program (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)(2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
		Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	39,3%	100	100	100 %	100%	35,7%	100%	2,8%
		Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	31,14%	20,98	55,07 %	20,98	38,09%	26,34%	48,21	34,13%
		Persentase personil SATPOL PP yang berkompeten	81,1	52,00	93,33	52,00	55,71%	78,4	85,33	60,8%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase aparatur pemadam kebakaran sesuai klasifikasi	67%	28,75%	28,92%	28,75%	28,83%	64%	42,53%	60,67%



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d dengan Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (n-2)			Target program (Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
		cakupan relawan pemadam kebakaran dikabupaten dan kota	0	6,3	0,39	6,3	1615	0	6,3	6,3
		Persentase aparatur pemadam kebakaran sesuai kualifikasi	0	24	70,19	24	34,19	0	24	24
		Persentase sapsras pemadam kebakaran dan pertolongan dalam kondisi baik	0	85	85	85	100	0	85	85
		Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	67	0				64		



Berdasarkan hasil Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 (Tabel II.1) diatas, dapat disajikan bahwa terdapat evaluasi berdasarkan RPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026 untuk sandingan evaluasi Renja Tahun 2023 dan sandingan evaluasi Renja perkiraan Tahun 2025.

Adapun kendala yang dihadapi terkait terhambatnya pencapaian target kinerja dan keuangan SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Defisit anggaran yang terlalu besar sehingga dilakukan pemangkasaan anggaran secara besar-besaran dan mengakibatkan pelaksanaan kegiatan operasional menjadi tidak optimal.
2. Penundaan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis pada Pemadam Kebakaran karena sefisit anggaran secara besar-besaran
3. Penundaan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penyidik PPNS tidak dapat dilaksanakan karena defisit anggaran
4. Kurangnya Pemahaman serta koordinasi antar PPNS Pada OPD lain dengan PPNS SatpolPP terhadap Perda apa saja yang ditegakkan sehingga menyebabkan seperti tidak ada koordinasi yang aktif
5. Keterbatasan jumlah personil dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, apalagi beberapa tugas yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan, seperti patroli, pengamanan, pengamanan demo, penertiban, pengawalan dan lain-lain;



**Tabel 2.2**  
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2026  
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	%
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%				
Semua Bidang																													
		PROGR AM PENUNJ ANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP perangkat Daerah (Nilai) (Nilai)	80,50	11.648.200.000	0,00	-	80	13.927.906.265	3.626.999.542	4.102.242.880	3.019.411.744	2.748.565.767	-	13.497.219.933	0,00%	96,91%	79,50	13.497.219.933	115,87%								SATPOL PP	
			Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan OPD (%)	78,80		0,00		77						-		0,00%		75,00											
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.279.000.000		-		265.728.700	14.740.710	26.925.000	63.880.561	86.938.550		192.484.821		72,44%		192.484.821										



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2,00	880.000.000	0,00	-	5	118.622.200	-	14.740.710	-	14.760.000	-	14.584.820	5	33.234.200	5	77.319.730	100,00%	65,18%	5,00	77.319.730	250,00%	8,79%		Tidak Ada		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	25,00	252.000.000	0,00	-	33	61.449.700	-	-	-	8.445.000	-	14.839.517	33	17.682.650	33	40.967.167	100,00%	66,67%	33,00	40.967.167	132,00%	16,26%		Tidak Ada		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7,00	147.000.000	0,00	-	5	85.656.800	-	-	-	3.720.000	-	34.456.224	5	36.021.700	5	74.197.924	100,00%	86,62%	5,00	74.197.924	71,43%	50,47%		Tidak Ada		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-		-		12.371.664.765		3.421.138.132		3.856.353.713		2.703.416.327		2.288.303.975		12.269.212.147		99,17%		12.269.212.147		0,00%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		-	0,00	-	78	12.325.168.765	-	3.416.368.132	-	3.856.353.713	-	2.680.184.006	78	2.273.538.975	78	12.226.444.826	100,00%	99,20%	78,00	12.226.444.826	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		-	0,00	-	60	6.499.600	-	-	-	-	-	6.200.000	60	-	60	6.200.000	100,00%	95,39%	60,00	6.200.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada		



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan				
					5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	%		
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		-	0,00	-	13	39.996.400	-	4.770.000	-	-	-	17.032.321	13	14.765.000	13	36.567.321	100,00%	91,43%	13,00	36.567.321	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			19.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%						
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2,00	19.700.000	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.622.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%						



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
					7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	-	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan pantrya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	152,50	1.372.100,00	0,00	-	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5,00	250.000,00	0,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.675.000,00	-		246.263,00		50.742,284		68.951,052		26.276,857		61.910,426		207.880,619		84,41%		207.880,619		78,61%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	59.000,00	0,00	-	1	14.960,300	-	-	-	4.000,000	-	-	1	9.612,500	1	13.612,500	100,00%	90,99%	1,00	13.612,500	100,00%	23,07%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	0,00	-	1	2.975,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	99.000,00	0,00	-	2	19.496,200	-	2.978,000	-	2.846,500	-	3.873,000	2	5.561,500	2	15.259,000	100,00%	78,27%	2,00	15.259,000	200,00%	15,41%		Tidak Ada



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
																											I	
									1	2	3	4		5		6											7	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1,00	90.000.000	0,00	-	1	17.794.400	-	929.600	-	2.726.350	-	4.993.550	1	4.260.400	1	12.909.900	100,00%	72,55%	1,00	12.909.900	100,00%	14,34%		Tidak Ada	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	0,00	-	-	1	5.040.000	-	1.876.000	-	-	-	1.000.000	1	800.000	1	3.676.000	100,00%	72,94%	1,00	3.676.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Penyediaan Bahan Material	*Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan (Paket)	4,00	409.000.000	0,00	-	4	80.997.100	-	-	-	32.104.402	-	8.170.307	4	21.275.006	4	61.549.715	100,00%	75,99%	4,00	61.549.715	100,00%	15,05%		Tidak Ada	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	10,00	78.000.000	0,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36,00	940.000.000	0,00	-	36	105.000.000	12	44.958.684	1	27.273.800	2	8.240.000	12	20.401.020	36	100.873.504	100,00%	96,07%	36,00	100.873.504	100,00%	10,73%		Tidak Ada	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.570.000.000		-		78.991.600		-		-		4.255.000		71.645.000		75.900.000		96,09%		75.900.000		30,36%			



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	%
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12,50	360.000.000	0,00	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2,50	1.960.000.000	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10,00	250.000.000	0,00	-	5	78.991.600	-	-	-	-	4.255.000	4	71.645.000	4	75.900.000	80,00%	96,09%	4,00	75.900.000	40,00%	30,36%		Tidak Ada			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.954.400.000		-		540.860.000		134.487.416		83.228.921		164.641.539		139.428.556		521.786.432		96,47%		521.786.432		39,13%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12,00	19.400.000	0,00	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36,00	645.000.000	0,00	-	36	163.860.000	9	38.787.416	9	22.328.921	9	48.641.539	9	35.028.556	36	144.786.432	100,00%	88,36%	36,00	144.786.432	100,00%	22,45%		Tidak Ada		



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan				
					5		6		7		8		9		10			11		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,50	30.000.000	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13,00	2.260.000.000	0,00	-	12	377.000.000	4	95.700.000	4	60.900.000	4	116.000.000	4	104.400.000	16	377.000.000	100,00%	100,00%	16,00	377.000.000	123,08%	16,68%		Tidak Ada		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.528.000.000		-		424.398.200		5.891.000		66.784.194		56.941.460		100.339.260		229.955.914		54,18%		229.955.914		22,80%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	18,00	1.333.000.000	0,00	-	12	384.408.200	4	5.891.000	4	61.499.194	4	52.121.460	4	97.769.260	16	217.280.914	100,00%	56,52%	16,00	217.280.914	88,89%	16,30%		Tidak Ada		
		Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan																					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%																		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	%																	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	39,00	195.000.000	0,00	-	40	39.990.000	-	-	20	5.285.000	-	4.820.000	20	2.570.000	40	12.675.000	100,00%	31,70%	40,00	12.675.000	102,56%	6,50%		Tidak Ada																	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	-	0,00	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada																		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			99,87%	96,91%																								
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																																												
	Meningkatkan Kebebasan Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	<b>PROGR AM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan (Persentase)	100,00		0,00		100											-	0,00%	100,00						SATPOL PP																	
			Persentase anggota satlinmas yang terlihat dan dikukuhkan (Persentase)	35,00	1.050.000.000	0,00	-	31,14	7.248.129.120		1.537.179.740		1.240.565.708		2.037.947.200		1.985.024.418		6.800.717.066	0,00%	93,83%	26,34	6.800.717.066		647,69%																			
			Persentase personil Satpol PP yang berkompeten (Persentase)	83,26		0,00		81,1											-	0,00%	78,40																							



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%				
			Persentase perda dan perkara yang ditaggalkan (Persentase)	43,58		0,00		39,3										-		0,00%		35,70							
		Penanganan Gangguan Ketertamanan dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah anggota satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan kelenyamanan masyarakat melalui patroli, pengamanan, penertiban dan pengawalan berjalan lancar Jumlah penyelenggaraan pembinaan, deteksi dini dan cegah dini yang digunakan dalam pencegahan gangguan tiburmitranmas umiah SDM Satpol PP yang berkompeten (orang 604 kali 12 kali 60 orang)	150.000.000	0,00	-	200	6.946.393.400	-	1.537.179.740	-	1.220.534.248	-	2.029.082.200	-	1.928.144.318	-	6.714.940.506	0,00%	96,67%	0,00	6.714.940.506	0,00%	0,00%					



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan				
					5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	%		
		Penyusunan SOP Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat	*Jumlah Dokumen SOP Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)		150.000.000	0,00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada				
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	*Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia (Unit)		-	0,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada				
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)		-	0,00	-	1	127.972.000	-	4.375.720	-	45.410.000	-	52.870.000	1	16.235.000	1	118.890.720	100,00%	92,90%	1,00	118.890.720	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan (Laporan)	*Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada		-	0,00	-	3	1.747.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada				



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
					7		8		9		10		11		12		13=12/x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Peraturan Kepala Daerah																									
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterbacaan Umum	*Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterbacaan Umum (Laporan)					1	217.995.600	-	143.675.820	-	30.950.848	-	19.123.300	1	-	1	193.749.968	100,00%	88,88%	1,00	193.749.968	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Keterbacaan Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Keterbacaan Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)					200	6.379.192.900	50	1.354.128.200	50	1.104.433.400	50	1.906.646.500	200	1.871.721.508	200	6.236.929.608	100,00%	97,77%	200,00	6.236.929.608	0,00%	0,00%		Tidak Ada



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
									I		II		III		IV													
									5		6		7		8												9	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%					
		lan																										
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja (Orang)																									Tidak Ada





No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan	
									I		II		III		IV											
									5		6		7		8											9
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
		Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	645.000.000	0,00	-	1	105.986.700	-	-	-	10.220.860	-	4.425.000	1	20.627.000	1	35.272.860	100,00%	33,28%	1,00	35.272.860	0,00%	5,47%		Tidak Ada
		Pemberikasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Pemberikasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	-	0,00	-	1	18.750.000	-	-	-	9.810.600	-	-	1	6.025.900	1	15.836.500	100,00%	84,46%	1,00	15.836.500	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		255.000.000	-	-	-	82.999.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-		
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda (Laporan)	0,50	255.000.000	0,00	-	1	82.999.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													98,83%	93,83%													
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													
	Meningkatkan Kebebasan Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGANAN, PENYELAMATAN AMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase responstime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan (Persentase)	69,60	1.190.000.000	0,00	-	67	1.202.493.092	48.313.346	375.012.000	283.551.000	342.106.400	-	1.048.982.746	0,00%	87,23%	64,00	1.048.982.746	88,15%		SATPOL PP					
		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			1.190.000.000		-		1.141.493.212	35.680.782	364.935.600	253.777.000	336.244.700		990.638.082		86,78%		990.638.082	204,92%							
		Penyelenggaraan dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)		345.000.000	0,00	-	7	62.324.712	-	7.260.782	-	16.005.600	-	10.060.000	7	21.107.100	7	54.433.482	100,00%	87,34%	7,00	54.433.482	0,00%	15,78%	Tidak Ada	



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan														
																											I		II		III		IV		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
																											8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%															
		Kebakaran																																						
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	*Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal (Dokumen)	50.000.000	0,00	-	1	104.987.000	-	13.420.000	-	7.500.000	-	13.802.000	1	58.503.000	1	93.225.000	100,00%	88,80%	1,00	93.225.000	0,00%	186,45%		Tidak Ada														
		Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyediaan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten	*Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota (Orang)	795.000.000	0,00	-	60	126.446.400	-	-	-	-	-	7.380.000	-	13.994.600	-	21.374.600	0,00%	16,90%	0,00	21.374.600	0,00%	2,69%		Tidak Ada														



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan				
					5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	%		
		en/Kota																												
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)					12	770.500.000	-	-	-	335.780.000	-	216.560.000	12	217.790.000	12	770.130.000	100,00%	99,95%	12,00	770.130.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)					4	77.235.100	-	15.000.000	-	5.650.000	-	5.975.000	4	24.850.000	4	51.475.000	100,00%	66,65%	4,00	51.475.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada			



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					60.999.880		12.632.564		10.076.400		29.774.000		5.861.700		58.344.664		95,65%		58.344.664		0,00%			
		Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan, Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)			0,00	1	60.999.880	-	12.632.564	-	10.076.400	-	29.774.000	1	5.861.700	1	58.344.664	100,00%	95,65%	1,00	58.344.664	0,00%	0,00%		Tidak Ada
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																		89,48%	87,23%							
<b>Predikat Kinerja</b>																		Tinggi	Tinggi							
<b>22.378.528.477</b>								<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>										98,97%	95,39%							
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							



Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*)	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**)	:

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Visi dan Misi RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 maka SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program- program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada dasarnya kegiatan SATPOL PP adalah sebagai “Pengaruh”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi PD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah



## PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan surat dari BPSDM Kemendagri bahwa perlunya peningkatan kompetensi bagi anggota Satpol PP dan Pemadam kebakaran serta kegiatan yang mendukung pelaksanaan pelayanan Standar Pelayanan pada Masyarakat untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.



**Tabel 2.3**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP  
Provinsi kepulauan Bangka Belitung

No.	Indikator	Target Renstra PD (kuambil dari terget renstra)						Realisasi Capaian (lakip)				Proyeksi (2023, kira2)	Catatan
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	
1.	Persentase penurunan gangguan ketertibann umum dan ketentraman masyarakat	-	95%	90%	85%	26,00%	25,30%	65%	63%	26,26	48,47%	50%	-
2.	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/ pertolongan	-	10,23%	16,33%	22,38%	30%	35 %	7,87%	8%	-	61,60%	63,80%	-
3	Nilai RB unit Satpol PP	-	-	--	-	12	13	-	-	-	12,22	13%	

### 2.2.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam pelayanan tugas dan fungsi SKPD adalah:

1. Masyarakat Provinsi kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya merasakan tentram, tertib, teratur dan aman serta terlindungi dalam menjalankan kegiatannya. Terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui sepanjang, Tahun 2019 sebanyak 975 orang/pelanggar; Tahun 2020 sejumlah 941, Tahun 2021, sejumlah 1737, Tahun 2022 sejumlah 749 serta tahun 2023 sejumlah 492 dan Tahun 2024 sejumlah 536.
2. Kondisi kenyamanan, ketentraman, ketertiban dan keamanan juga dapat digambarkan dengan angka jumlah kriminalitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun *trendnya* menurun, terjadi tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kasus tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 sebanyak 1.453 kasus, Tahun 2020 sejumlah 1320, Tahun 2021, sejumlah 1127, Tahun 2022 sejumlah 1321 serta tahun 2023 sejumlah 1125 dan tahun 2024 berjumlah 222 sejumlah pada Tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan hal ini dikarenakan kerjasama yang baik antara masyarakat dan kepolisian sehingga lingkungan lebih aman dan kondusif.
3. Belum semua Bangka Belitung mendapatkan pelatihan dalam rangka , serta membantu penanganan bencana dan kebakaran. Data per 31 Desember 2024 jumlah anggota Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1254 orang, namun baru 820 orang anggota Satlinmas yang telah mendapatkan pelatihan;
4. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang cukup sering mengalami bencana kebakaran terlebih juga lahan kering yang berada disekitaran wilayah kompleks perkantoran Provinsi Kepulauan Banga Belitung . Sampai dengan tahun 2019 telah terjadi 1.565 kasus kebakaran, Tahun 2020 terjadi 403 kasus kebakaran, Tahun 2021 terjadi sebanyak 227 kasus pada

Tahun 2022 terjadi sebanyak 225, Tahun 2023 terjadi sejumlah 1955 kali kasus kebakaran dan hanya 1086 kejadian yang bisa dikategorikan sebagai kebakaran yang dilayani dalam waktu tanggap 15 menit (respon time), pada tahun 2024 terjadi kebakaran sejumlah 495 dan hanya 295 yang bisa dikategorikan dalam waktu tanggap 15 menit (respon time) hal tersebut disebabkan karena sarana dan prasarana yang tidak mendukung Standar Pelayanan Minimal sehingga sampai Saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peta khusus daerah rawan kebakaran. Tidak hanya itu, kecuali anggota Satlinmas, masyarakat/relawan pemadam kebakaran harus dilakukan pengembangan terhadap kapasitas dan kompetensi pemadam kebakaran

### 2.2.2 *Permasalahan dan Solusi*

Kendala dan permasalahan yang dihadapi SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2026 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya Bimbingan teknis Linmas dalam menangani kantarntibmas, bencana dan kebakaran karena sosial distancing/ Jaga jarak yang diterapkan oleh pemerintah
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah yang telah dikembangkan.
4. Defisit anggaran serta tagging yang dilakukan berdampak terhadap penundaan kegiatan - kegiatan yang urgent untuk dilaksanakan

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan bimbingan teknis Linmas secara *zoom meeting*, guna mengoptimalkan kapasitas linmas dalam menangani bencana dan kebakaran

2. Melakukan koordinasi ke bidang – bidang internal SATPOLPP untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada program, kegiatan dan sub kegiatan
3. koordinasi dan komunikasi secara teritegrasi terhadap 7 kabupaten/kota

### 2.2.3 *Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL PP*

Berdasarkan tugas dan fungsinya serta hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Renstra Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 dan Renstra SATPOL PP kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, serta hasil analisis terhadap KLHS, SATPOL PP dihadapkan pada beberapa tantangan dalam memberikan pelayanan pada masa-masa yang akan datang. Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh SATPOL PP antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat, aparaturnya dan badan hukum terhadap peraturan perundang-undangan daerah
2. Tuntutan terhadap pelayanan Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan perda/perkada
3. Luasnya cakupan wilayah/ wilayah kepulauan
4. Perlunya penganggaran yang terarah terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pada anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan arahan dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri

Kebebasan berpendapat, yang menjamin masyarakat untuk menyuarakan pendapat melalui demonstrasi/unjuk Rasa Sedangkan peluang bagi Satpol PP dalam melaksanakan pelayanan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan masyarakat akan kondisi hidup yang tertib, tentram, aman dan terlindungi dari bencana
2. Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan peran dan tugas Satpol PP

3. Peraturan yang mengamankan Satpol PP dapat bekerjasama dan penegak hukum seperti Kepolisian dan TNI

### 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 dilakukan dengan melakukan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 2.4  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pkp	Nilai Sakip PD	80%	240.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Sakip PD	80%	340.000.000
			Indeks Kepuasan pelayanan internal	77%	13.850.46.402			Indeks Penunjang Kepuasan pelayanan internal	77%	15.124.569.520

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pkp	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	240.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	340.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pkp	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	80.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	210.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pkp	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	25	80.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	25	90.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pkp	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	80.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	100.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pkp	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan	81%	12.579.212.147	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pkp	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan	81%	11.701.500.000
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pkp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	12.531.212.147	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pkp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	11.670.000.000
	Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pkp	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	60	8.000.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Pkp	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	60	6.500.000
	Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Pkp	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	0	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Pkp	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	5.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Pkp	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	40.000.000	Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Pkp	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	20.000.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik	Pkp	Jumlah BMD yang Teradmini	1134/2	0	Administrasi Barang Milik	Pkp	Jumlah BMD yang Teradmini	1149/2	3.500.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Daerah pada Perangkat Daerah		trasi Sesuai dengan Peraturan			Daerah pada Perangkat Daerah		trasi Sesuai dengan Peraturan		
	Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pkp	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pkp	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	3.500.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pkp	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	81		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	80	360.000.000
	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Pkp	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	2	10.000.000					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pkp	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	78	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pkp	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	227	371.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pkp	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	10	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pkp	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	10	160.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pkp	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	95%	179.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pkp	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	95%	325.760.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pkp	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	14.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pkp	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pkp	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	3.000.000					
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Pkp	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10	14.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Pkp	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10	12.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pkp	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	19.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pkp	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	19.500.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pkp	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	14.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pkp	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	17.700.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pkp	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pkp	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	16.560.000
	Penyediaan Bahan/Material	Pkp	Jumlah Paket Bahan/Material	4	50.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Pkp	Jumlah Paket Bahan/Material	4	80.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
			yang Disediakan					yang Disediakan		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pkp	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	14.000.000					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pkp	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	85.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pkp	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	170.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	29	137.485.255	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	29	1.185.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pkp	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	22.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pkp	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	75.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pkp	Jumlah barang milik daerah penunjang pemerintah daerah yang diadakan	1	1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pkp	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakaan	4	1.060.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pkp	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	115.485.254	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pkp	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	50.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pkp	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	474.746.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pkp	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	576.100.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pkp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pkp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.700.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pkp	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan PD	36	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pkp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	120.000.000
	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Pkp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	12	0					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pkp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	452.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pkp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	452.400.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pkp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan nya	18	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pkp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan nya	18	261.073.000
	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Pkp	Laporan Pemeliharaan Mebel	1	0					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pkp	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pkp	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	30.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Pkp	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	1	25.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Pkp	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan /Direhabilitasi	1	25.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Babel	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	9.796.500.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Babel	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	9.150.000.000
		Babel	Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	31,14%	170.000.000		Babel	Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	26,34%	170.000.000
		Babel	Persentase personil Satpol PP yang berkompeten	81,1%	120.000.000		Babel	Persentase personil Satpol PP yang berkompeten	78,38%	120.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
		Pkp	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	39,3%	230.000.000		Pkp	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	35.70%	230.000.000
	kegiatan Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kotora dalam 1 (satu) daerah provinsi	Babel	Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat melalui patroli, pengamanan, penertiban dan pengawalan berjalan lancar	604	9.440.000.000	kegiatan Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Babel	Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat melalui patroli, pengamanan, penertiban dan pengawalan berjalan lancar	604	9.440.000.000
			Jumlah penyelenggaraan pembinaan, deteksi dini dan cegah dini yang digunakan dalam pencegahan gangguan tibumtran mas	12				Jumlah penyelenggaraan pembinaan, deteksi dini dan cegah dini yang digunakan dalam pencegahan gangguan tibumtran mas	12	
			Jumlah anggota satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	50				Jumlah anggota satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	1	
			Jumlah SDM Satpol PP yang berkompeten	60				Jumlah SDM Satpol PP yang berkompeten	60	

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Sub kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan		Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	576	6.034.000.000	kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan		Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	588	8.370.000.000
	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara	Babel	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	28	45.000.000	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara	Babel	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	27	65.000.000
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi	Babel	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban	1	0	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi	Babel	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban	1	50.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
			umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi					umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi		
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Babel	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1	90.000.000	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Babel	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1	120.000.000
	Sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia (HAM)	Pkp	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	7	95.000.000	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia (HAM)	Pkp	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	7	170.000.000
	Sub kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Pkp	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	17	1	sub kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Pkp	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	16	605.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pkp	Jumlah dokumen layanan dampak penegakan perda dan perkada yang terlayani	1	20.000.000	sub kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pkp	Jumlah dokumen layanan dampak penegakan perda dan perkada yang terlayani	1	30.000.000
	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketentraman Masyarakat	Pkp	Jumlah satu dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dibuat dan dimutakhirkan	21	30.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketentraman Masyarakat	Pkp	Jumlah satu dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dibuat dan dimutakhirkan	1	30.000.000
	Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Babel	Jumlah sosialisasi perda dan pergub terhadap masyarakat, aparatur dan badan usaha	10	0	Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Babel	Jumlah sosialisasi perda dan pergub terhadap masyarakat, aparatur dan badan usaha	1	120.000.000
			Jumlah penindakan non yustisial terhadap pelanggar perda dan pergub	62				Jumlah penindakan non yustisial terhadap pelanggar perda dan pergub		

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Pemberkas an administrasi penyidikan oleh PPNS penegak perda, dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS	Pkp	Jumlah dokumen pemberkas an hasil penyidikan atas pelanggar perda, jumlah perkara yang dapat disidangkan di tempat dan sekretariat PPNS di Satpol PP	2	50.000.000	Pemberkas an administrasi penyidikan oleh PPNS penegak perda, dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS	Pkp	Jumlah dokumen pemberkas an hasil penyidikan atas pelanggar perda, jumlah perkara yang dapat disidangkan di tempat dan sekretariat PPNS di Satpol PP	2	50.000.000
	Sosialisasi ketentuan sanjsi eraturan daerah dan peraturan kepala daerah		Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakkan Perda dan Perkada	4 laporan	50.000.000	Sosialisasi ketentuan sanjsi eraturan daerah dan peraturan kepala daerah		Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakkan Perda dan Perkada	4 laporan	50.000.000
	Sub kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan	Babel	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan	1	120.000.000	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan	Babel	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan	1	120.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pkp	Jumlah penyidikan terhadap pelanggar perda dan pergub	99	80.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pkp	Jumlah pol pp dan ASN OPD yang memiliki kualitas sebagai PPNS	0	110.000.000
	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung capaian SPM trantibum	Pkp	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara operasional sudah aktif	1	80.000.000	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Pkp	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara operasional sudah aktif	1	60.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prov. Kep. Babel	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	64%	1.420.000.000	PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Prov. Kep. Babel	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	67%	1.420.000.000
	Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Prov. Kep. Babel	Jumlah dokumen peta daerah rawan bencana kebakaran	0	100.000.000	Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Prov. Kep. Babel	Jumlah dokumen peta daerah rawan bencana kebakaran	1	100.000.000
			Jumlah sapras pemadam kebakaran atau pertolongan yang tersedia	30	160.000.000			Jumlah sapras pemadam kebakaran atau pertolongan yang tersedia	8	160.000.000
			Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang mendapatkan pembinaan	87	960.000.000			Jumlah dokumen standarisasi sapras pemadam kebakaran dan pertolongan	106	960.000.000
			Jumlah dokumen standarisasi sapras pemadam kebakaran dan pertolongan	1	150.000.000			Jumlah dokumen standarisasi sapras pemadam kebakaran dan pertolongan	4	150.000.000
			Jumlah dokumen kerjasama antar	1				Jumlah dokumen kerjasama antar		

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
			daerah/antar lembaga					daerah/antar lembaga		
	Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Prov. Kep. Babel	Jumlah dokumen informasi daerah (Kab/Kota) rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran yang sah dan legal	1	0	Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Prov. Kep. Babel	Jumlah dokumen informasi daerah (Kab/Kota) rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran yang sah dan legal	1	100.000.000
	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kab/kota	Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	273.000.000	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kab/kota	Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	960.000.000
	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakarng diri		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	1	60.000.000	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakarng diri		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	1	60.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	18	60.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	18	100.000.000
	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri		Jumlah dokumen periodik penyelenggaraan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	0	40.000.000	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri		Jumlah dokumen periodik penyelenggaraan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	0	0
	Bimtek terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kab/Kota		Jumlah aparatur kebakaran yang mengikuti bimbingan teknis pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kab/Kota	60	135.000.000	Bimtek terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kab/Kota		Jumlah aparatur kebakaran yang mengikuti bimbingan teknis pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kab/Kota	60	150.000.000

Kode	Rancangan awal				Hasil evaluasi kebutuhan					
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	7	Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	7	80.000.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	7	50.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	80.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	50.000.000

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2026 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005- 2025,
- c. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026,
- d. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023,
- e. Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
- f. Renstra SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 serta
- G. Mempertimbangkan isu-isu yang berkembang.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan serta selaras dengan RPD 2023-2026 yang telah ditetapkan untuk dijadikan acuan dalam penyusunan rancangan renja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Kerangka Pembangunan RPD 2023-2026 tema pembangunan nasional tahun 2025 adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Hal ini juga selaras dengan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 yaitu “Penguatan Perekonomian, Sdm Dan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Sumberdaya Dengan Cerdas dan Berwawasan Lingkungan”.

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 adalah:

1. Penguatan dan peningkatan perekonomian daerah
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM
3. Peningkatkan partisipasi publik dan Tatakelola Pemerintahan
4. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 13 Seri D), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP dan subbagian kebakaran dan penyelamatan) yang menjadi kerwenangan provinsi;
- b. Penyelenggaraan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP dan subbagian kebakaran dan penyelamatan) yang menjadi kewenangan provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi dinas;

- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Memperhatikan sasaran pembangunan Pemerintah tahun 2026, prioritas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026 serta capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2023-2026 dan target indikator kinerja yang direncanakan pada RPD SATPOL PP tahun 2023-2026, maka rencana program dan kegiatan SATPOL PP tahun 2026 mendukung seluruh sasaran dan prioritas dimaksud serta sebagai upaya pencapaian target kinerja RENSTRA SATPOL PP. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SATPOL PP maka tujuan penyusunan Rencana Kerja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
2. Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah (Satpol PP)

Sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan di atas sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1  
Sasaran dan Target Kinerja SATPOL PP  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2025 dan Tahun 2026

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
1	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	5,50%	6,00%

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024
2	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	4,90%	4,80%
3	Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah (Satpol PP)	Predikat RB Perangkat Daerah (Satpol PP)	-	-

### 3.3 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mencapai visi tersebut akan ditempuh melalui 9 (sembilan) misi yakni:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan teRpercaya..
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan teRpercaya.
9. Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) telah menyusun Renstra K/L Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dirjen BAK 2020-2024, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) merupakan penyusun kebijakan teknis urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sekaligus pembantu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pembina Satpol PP. Analisis terhadap Renstra K/L Dirjen BAK disajikan dalam tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.2  
Analisis Renstra K/L  
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan

Aspek Tinjauan	Isi Aspek Tinjauan	Analisis
Visi	Dirjen yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif dalam mewujudkan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tata kelola kewilayahan yang efektif dan terintegrasi untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Dalam Negeri	Dirjen yang mampu menyesuaikan diri dalam setiap keadaan, mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerinathan dalam negeri, dan memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan
Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Merumuskan regulasi yang mampu meningkatkan kualitas poenyelenggaraan trantibumlinmas dan kewilayahan</li> <li>Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan trantibum, pelayanan bencana dan pelayanan kebakaran</li> </ol>	Misi Dirjen BAK khusus nomor 2 (dua) sangat sesuai dengan tugas Satpol yakni menegakan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Aspek Tinjauan	Isi Aspek Tinjauan	Analisis
	<p>dan penyelamatan yang sesuai standar</p> <p>3. Memperkuat fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) menjadi katalisator yang mampu menjadi poros strategis dalam peningkatan hubungan pusat dan daerah melalui koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, menyinkronkan pengelolaan kawasan dan perkotaan, meningkatkan kerja sama daerah, mengawal penyelenggaraan layanan perizinan terintegrasi dan terpadu serta mengefektifkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah.</p> <p>4. Memperkuat basis data integrasi segmen batas dan pembakuan rupabumi dengan informasi geospasial, serta kinerja kecamatan selaku perangkat daerah yang bersifat kewilayahan.</p> <p>5. Mengembangkan proses bisnis trantibumlinmas</p>	

Aspek Tinjauan	Isi Aspek Tinjauan	Analisis
	dan kewilayahan yang didukung SDM yang kompeten dan optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya sistem politik yang demokrasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila</li> <li>2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan public yang berkualitas dan penguatan inovasi</li> </ol>	Dari kalimat tujuan dimaksud, nampak tidak menyinggung Satpol PP secara tegas, namun demikian sesuai tujuan nomor 1 (satu) Satpol PP memiliki peran dalam mewujudkan demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dengan penyelenggaraan trantibumlinmas dengan baik
Sasaran Srategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas</li> <li>2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan</li> </ol>	Tujuan nomor 1 (satu) merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan nomor 1 dari Dirjen BAK Kementerian Dalam Negeri

### 3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Tahun 2026 tentunya berpedoman pada dokumen Perubahan RPD 2023-2026 ditampilkan dalam tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.3  
Target Sasaran Strategis  
Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
1.	Meningkatnya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	5,50 %
		Meningkatnya respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	4,90 %
2.	Terwujudnya reformasi birokrasi perangkat daerah, dengan sasaran meningkatkan tata kelola internal satpol PP.	Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Satpol PP	Nilai reformasi birokrasi unit Satpol PP	-

### 3.5 Program dan Kegiatan Tahun 2026

Perumusan program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan pencapaian misi dan misi kepala daerah, yakni misi ke 5 (lima) yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi dan ke 6 (enam) yakni pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup dan misi lainnya yang diintegrasikan pada level kegiatan dan

sub kegiatan. Perumusan program dan kegiatan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana dengan peraturan tersebut mengatur nama program dan kegiatan sampai dengan sub kegiatannya.

Jumlah program dalam rancangan akhir Renja 2025 Satpol PP 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan di program urusan pemerintahan daerah, dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan dengan pagu indikatif total Rp.22.372.028.877,

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 dibawah ini merupakan program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, terdapat 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan di program urusan pemerintahan daerah, dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan dengan pagu indikatif total Rp.. 21. 287. 461. 403,

Bidang Kerja melaksanakan 3 (tiga) program yakni program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, kemudian program penanggulangan kebakaran, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan sedangkan sekretariat melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang terdiri 8 (delapan) kegiatan dan 32 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Adapun nomenklatur program dan kegiatan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

#### A. RUTIN

##### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini merupakan program dalam mendukung peningkatan pelayanan rutin Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kegiatan sebagai berikut:

#### A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3. Evaluasi kinerja perangkat daerah

#### B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
  2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  3. Penyediaan bahan logistik kantor
  4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  6. Penyediaan bahan/material
  7. Fasilitasi kunjungan tamu
  8. Penyelenggraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
  2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  3. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan jasa surat menyurat
  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  2. Pemeliharaan Mebel
  3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

B. BIDANG KERJA

1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini merupakan program dalam mendukung pelaksanaan sub urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum

A. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

1. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
2. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
3. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa HAM
4. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
5. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

6. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
  7. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
  8. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
  9. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkara
- B. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
1. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
  2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur
- C. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
  2. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS
- 2) Program Pencegahan, Penanganan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Program ini merupakan program dalam mendukung pelaksanaan sub urusan bidang kebakaran
- A. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
1. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
  2. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota
  3. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan

dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

4. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
  5. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
  6. Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
- B. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1. Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan  
Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	1	1	1.01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Nilai sakip perangkat daerah	Nilai sakip perangkat daerah	Pkp		80	80	240.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	80	239.000.000
							Survei kepuasan pelayanan internal	Survei kepuasan pelayanan internal	Pkp		77%	77%	14.090.221.402	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	81%	13.575.500.000
5	1	1	1.01		Kegiatan Perencanaan, peanggarab dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah dokumen perencana an dan evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Dokumen	7 Dokum en	240.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	7 Dokumen	265.000.000
5	1	1	1.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah dokumen perencana an Renstra dan Renja PD	Jumlah dokumen perencanaan Renstra dan Renja PD	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokum en	80.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	2 Dokumen	180.000.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	1	1	1.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai saki p PD (Satpol PP)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen	80.000.000	APBD		Nilai saki p PD (Satpol PP)	25 Dokumen	30.000.000
5	1	1	1.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai saki p PD (Satpol PP)	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD, Dalev Renja dan Data Sektoral, SPM, RB)	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD, Dalev Renja dan Data Sektoral, SPM, RB)	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	80.000.000	APBD		Nilai saki p PD (Satpol PP)	7 Dokumen	55.000.000
5	1	1	1.02		Kegiatan Administrasi keuangan	Nilai saki p PD (Satpol PP)	Survei kepuasan pelayanan keuangan	Survei kepuasan pelayanan keuangan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	92%	92%	12.579.212.147	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	92%	11.915.000.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	1	1	1.02	01	Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Nilai saki p PD (Satpol PP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	78 Orang	78 Orang	12.531.212.147	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	78 Orang	11.900.000.000
5	1	1	1.02	03	Sub kegiatan Pelaksanaan penatusahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Nilai saki p PD (Satpol PP)	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	60 Dokumen	60 Dokumen	8.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	60 Dokumen	7.000.000
5	1	1	1.02	07	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai saki p PD (Satpol PP)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	0	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	2 Dokumen	5.000.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	1	1	1.02	07	Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran SKPD	Nilai saki p PD (Satpol PP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	13 Laporan	13 Laporan	40.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	13 Laporan	3.750.000
5	1	1	1.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai saki p PD (Satpol PP)				Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1119	13	0	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	1134	4.000.000
5	1	1	1.03	01	Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai saki p PD (Satpol PP)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	0	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	2 Dokumen	4.000.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode`	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
5	1	1	1.05		Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah						Program Penunjang Urusan Pemerintahan			207.500.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah		510.000.000
5	1	1	1.05	02	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai saki PD (Satpol PP)	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	0 unit	0 unit	0	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	2 unit	10.000.000	
5	1	1	1.05	02	Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Nilai saki PD (Satpol PP)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	0	78	0	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	252 Stel	450.000.000	
					Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Nilai saki PD (Satpol PP)	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	14 orang	10 orang	90.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	10 orang	50.000.000	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode`	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			pelatihan														
	Kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah				Program Penunjang Urusan Pemerintahan			179.000.000							345.500.000	
5	1	1	1.06	01	Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Paket	1 Paket	14.000.000	APBD	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah)	1 Paket	12.000.000
					Penyediaan Peralatan rumah tangga	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah paket peralatan rumag tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumag tangga yang disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Paket	Pkp	0		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	1 paket	0

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode`	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
			n															
5	1	1	1.06	04	Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2 Paket	1 Paket	16.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	2 Paket	19.500.000
5	1	1	1.06	05	Sub kegiatan Penyediaan cetak dan penggandaan	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Paket	1 Paket	14.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	1 Paket	18.000.000
5	1	1	1.06	06	Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	1 dokumen	18.000.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
			yang Disediakan	Disediakan														
5	1	1	1.06	07	Sub kegiatan Penyediaan bahan/material	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan/M aterial yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Mate rial yang Disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4 paket	4 paket	50.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	4 paket	81.000.000
5	1	1	1.06	08	Sub kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	10 Laoran	10 Laoran	0	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	10 Laoran	14.000.000
5	1	1	1.06	09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	36 Laoran	36 Laoran	85.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	36 Laoran	180.000.000

Rencana Kerja (Renja)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode`	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	1	1	1.07		Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah		Jumlah barang milik daerah yang diadahkan	Jumlah barang milik daerah yang diadahkan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	29 jenis	29 jenis	390.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	21 jenis	60.000.000
5	1	1	1.07	06	Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	15 unit	15 unit	22.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	10 unit	60.000.000
5	1	1	1.07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai saki PD (Satpol PP)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4 unit	4 unit	1	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	2 unit	230.000.000
5	1	1	1.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai saki PD (Satpol PP)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	10 unit	10 unit	115.485.254	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	10 unit	50.000.000

Rencana Kerja (Renja)

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode`	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target				
			Bangunan Lainnya yang Disediakan	Disediakan														
5	1	1	1.08		Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah jasa penunjang urusan pemda yang disediakan	Jumlah jasa penunjang urusan pemda yang disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	7 jenis	7 jenis	624.764.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	7 jenis	586.300.000
5	1	1	1.08	01	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	0	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	12 Laporan	3.900.000
5	1	1	1.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	0	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	1 Laporan	10.000.000

**Rencana Kerja (Renja)**

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode`	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
			n															
5	1	1	1.08	02	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	13 Laporan	13 Laporan	150.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	13 Laporan	150.000.000
5	1	1	1.08	03	Sub kegiatan Penyediaan jasa umum kantor	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	13 Laporan	13 Laporan	474.764.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	13 Laporan	474.764.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 1 1 1.09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai saki PD (Satpol PP)	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	70 unit	70 unit	0	APBD		Nilai saki PD (Satpol PP)	70 unit	585.000.000
5 1 1 1.09 02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Nilai saki PD (Satpol PP)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	0 unit	0 unit	0	APBD		Nilai saki PD (Satpol PP)	1 unit	2.000.000
5 1 1 1.09 02	Sub kegiatan penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai saki PD (Satpol PP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	6 unit	6 unit	200.000.000	APBD		Nilai saki PD (Satpol PP)	18 unit	500.000.000

**Rencana Kerja (Renja)**

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode`						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	1	1	1.09	06	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	12 unit	12 unit	20.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	40 unit	40.000.000	
5	1	1	1.09	10	Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disedia	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disedia	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	10 unit	10 unit	20.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	1 unit	25.000.000	
5	2				PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	8.966.500.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	100%	9.332.200.000	
						Persentase penurunan gangguan trantibum	Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26%	26%	120.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	31,00%	175.000.000	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode`	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
		Persentase penuruna n gangguan trantibum	Persentase personil Satpol PP yang berkompet en	Persentase personil Satpol PP yang berkompeten	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	78,40%	78,40%	170.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	81,10%	125.000.000				
		Persentase penuruna n gangguan trantibum	Persentase perda dan perkada yang ditegakka n	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Pkp	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	35,71%	35,71%	50.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	39,30%	230.000.000				
								9.670.000.000						10.090.000.000				
5	2	0 2	1'01		Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persentase penuruna n gangguan trantibum	Jumlah penyeleng garaan ketertiban umum dan ketentram an masyarak at melalui patroli, pengaman an, penertiba n dan pengawala n berjalan lancar	Jumlah penyelenggar aan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui patroli, pengaman an, penertiban dan pengawalan berjalan lancar	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	576	576	6.284.000.0001	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum)	604	8.390.000.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode`	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase penuruna n gangguan trantibum	Jumlah penyeleng garaan pembinaa n, deteksi dini dan cegah dini yang digunakan dalam pencegaha n gangguan tibumtranm as	Jumlah penyelenggar aan pembinaan, deteksi dini dan cegah dini yang digunakan dalam pencegahan gangguan tibumtranm as	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	12	12	685.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	12	1.090.000.000
		Persentase penuruna n gangguan trantibum	Jumlah anggota satlinmas yang ditingkatk an kapasitas nya	Jumlah anggota satlinmas yang ditingkatkan kapasitasny a	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	50	50	120.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	50	175.000.000
		Persentase penuruna n gangguan trantibum	Jumlah SDM Satpol PP yang berkompet en	Jumlah SDM Satpol PP yang berkompeten	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	58	58	170.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	60	175.000.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 2 0 2 1'01 01	Sub kegiatan Pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah kasus gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan dan patroli, pengamanan dan pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12 Laporan	12 Laporan	6.034.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	588 Kasus	8.370.000.000
5 2 0 2 1'01 02	Sub kegiatan Penindakan atas gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah kasus gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan	Jumlah kasus gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12 Laporan	12 Laporan	45.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	28 kasus	75.000.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode`	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
			penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan														
5	2	0 2	1'01	03	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1 Dokumen	1 Dokumen	0	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	1 Dokumen	65.000.000
5	2	0 2	1'01	04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan	Prov. Kep. Babel		1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	1 Dokumen	120.000.000



Kode`	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
			perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum														
5	2	0 2	1'01	05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk tugas yang bermuasa Hak Asasi Manusia (HAM)	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Pkp		190 orang	190 orang	90.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	200 orang	180.000.000
5	2	0 2	1.01	08 7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah sapras tibus	Jumlah sapras tibus	Pkp		0 unit	0 unit	1	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	17 unit	442.500.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode`	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 2 0 2 1.01 09	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah masyarakat yang terdampak penegakkan perda dan perkada yang dilayani	Jumlah masyarakat yang terdampak penegakkan perda dan perkada yang dilayani	Pkp		3 laporan	3laporan	20.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	1 laporan	30.000.000
5 2 0 2 1.01 08	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah satu dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dibuat dan dimutakhirkan	Jumlah satu dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dibuat dan dimutakhirkan	Pkp		0 dokumen	0 dokume n	0	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	21 dokumen	30.000.000
5 2 0 2 1'02	Kegiatan Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah aktivitas penegakan perda dan perkada	Jumlah aktivitas penegakan perda dan perkada	Prov. Kep. Babel		1 laporan	1 laporan	245.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	1 laporan	240.000.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 2 0 2 1'02 01	Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah sosialisasi perda dan pergub terhadap masyarakat, aparat dan badan usaha	Jumlah sosialisasi perda dan pergub terhadap masyarakat, aparat dan badan usaha	Prov. Kep. Babel		1 laporan	1 laporan	50.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	1 laporan	55.000.000
5 2 0 2 1'02 02	Sub kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan perda dan pergub	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan perda dan pergub	Prov. Kep. Babel		1 laporan	1 laporan	120.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	1 laporan	130.000.000
5 2 0 2 1'03	Sub kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah PPNS yang mampu melakukan pemberkasan penyidika	Jumlah PPNS yang mampu melakukan pemberkasan penyidika	Pkp		1 laporan/25 orang	1 laporan/25 orang	80.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	1 laporan/25 orang	60.000.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode`	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	2	0	1'03	01		n												
5	2	0	1'03	01	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Pkp		1 laporan	1 laporan	80.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	1 laporan	65.000.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 2 0 1'03 02	Pemberkasan Administrasi Penydikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penydikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penydikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	Pkp		2 dokumen	2 dokumen	0	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	2 dokumen	60.000.000
5 4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase responstime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	Persentase responstime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	Persentase responstime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	Prov. Kep. Babel	64	64	64	588.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	67	1.293.700.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode`	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			5						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 2 0 2 1'04	Kegiatan Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Persentase respon tim e 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Jumlah dokumen peta daerah rawan bencana kebakaran	Jumlah dokumen peta daerah rawan bencana kebakaran	Prov. Kep. Babel	64	1 dokumen	1 dokumen	508.000.000	APBD		Nilai saki p PD (Satpol PP)	1 dokumen	1.243.700.000
5 2 0 2 1'04 01	Sub Kegiatan Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Persentase respon tim e 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakara n dan Peta Rawan Kebakara n yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/ Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Prov. Kep. Babel	64	0 dokumen	0 dokumen	0	APBD		Nilai saki p PD (Satpol PP)	1 dokumen	0
5 2 0 2 1'04 03	Sub Kegiatan Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kab/kota	Persentase respon tim e 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Jml laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamata n Provinsi dan Kabupaten/ Kota	jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamata n Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Prov. Kep. Babel	64	1 laporan	1 laporan	273.000.000	APBD		Nilai saki p PD (Satpol PP)	1 laporan	960.000.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 2 0 2 1'04 04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakararang	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah kabupaten /kota dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/ kota dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan	Pkp	64	0 dokumen	0 dokumen	0	APBD		Nilai saki p PD (Satpol PP)	1 dokumen	70.000.000
5 2 0 2 1'04 05	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar	Pkp		10 unit	10 unit	60.000.000	APBD		Nilai saki p PD (Satpol PP)	18 unit	3.500.000.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode`	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
			standar teknis terkait	teknis terkait														
5	2	0	1'04	06	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	jumlah dokumen periodik penyekengaraan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri secara berkala, sah dan legal	jumlah dokumen periodik penyekengaraan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri secara berkala, sah dan legal	Pkp		1 2 Dokumen	1 2 Dokumen	40.000.000	APBD		Nilai saki PD (Satpol PP)	1 dokumen	0
5	2	0	1'04	06	Sub Kegiatan Bimtek terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Jumlah aparatur kebakaran yang mengikuti bimbingan teknis pencegahan	Jumlah aparatur kebakaran yang mengikuti bimbingan teknis pencegahan,	Pkp		60 orang	60 orang	135.000.000	APBD		Nilai saki PD (Satpol PP)	60 orang	160.000.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode`	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
	dan Kab/Kota		n, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota	penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota													
5	2	02	2'04	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran	7			7 laporan	7 laporan	80.000.000	APBD		Nilai saki p PD (Satpol PP)	1 laporan	50.000.000

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 2 0 2 2'04 01	Sub Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prov. Kep. Babel		1 laporan	1 laporan	84.999.880	APBD		Nilai saki PD (Satpol PP)	1 laporan	50.000.000
									23.558.881.485					25.117.450.000



## BAB V PENUTUP

Dengan adanya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) 2026 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dapat dicapai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, tentunya dengan melaksanakan arah kebijakan dan strategi yang dipedomani dalam dokumen Perubahan RPD 2023-2026 Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja 2026 Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan diverifikasi Bappeda ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD 2026. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program kegiatan dimaksud dapat direalisasikan secara optimal.

Besar harapannya dokumen Rancangan Akhir Renja 2026 ini tidak hanya menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, namun juga menjadi hal yang penting dan memudahkan kita dalam mengevaluasi dokumen perencanaan kedepan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Satpol PP akan mengevaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tidak hanya pada tataran laporan evaluasi, diharapkan juga



dokumen renja ini menjadi suatu hal yang membantu kita dalam menyiapkan dokumen laporan lain seperti LAKIP, LKPJ, SPM, Reformasi Birokrasi dan LPPD perangkat daerah.

4

Pangkalpinang, Maret 2025

KEPALA POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

YAMOWA'A HAREFA, AP. NIP.  
19750130 199402 1 003